

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 5 Bulan Maret 2021 (tanggal 26 Maret s.d 1 April)

POLEMIK SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK

Anin Dhita Kiky Amryudin
Peneliti Pertama Bidang Politik Dalam Negeri
anin.amryudin@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Permasalahan agraria di Indonesia telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Tercatat sepanjang tahun 2020 terdapat total 241 kasus konflik agraria. Total kasus terjadi di 359 daerah dengan korban 135.332 kepala keluarga (KK). Oleh karena itu, tujuan dari reforma agraria dan perhutanan sosial yang menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Joko Widodo masih jauh dari harapan.

Dalam rangka mewujudkan reforma agraria dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya dalam memberantas mafia tanah serta berbagai kasus sengketa tanah/agraria selama ini. Namun upaya ini menimbulkan polemik khususnya terkait tata laksana dalam implementasinya. Salah satunya terkait perbedaan persepsi dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 khususnya Pasal 16 ayat (3) yaitu sertifikat fisik akan ditarik dan diganti menjadi sertifikat elektronik.

SUMBER

Kusuma, Hendra. "DPR dan Sofyan Djalil Sepakat Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda", *DetikFinance*, 22 Maret 2021.

"Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan", *Kompas.com*, 6 Januari 2021.